

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang membentang dari Sabang sampai Merauke dan terletak di garis khatulistiwa. Luas wilayah Indonesia seluruhnya adalah 5,2 juta km² yang terdiri atas 1,9 juta km² daratan dan 3,3 juta km² lautan. Letak geografis Indonesia berada di antara 6° Lintang Utara – 11° Lintang Selatan dan 95° Bujur Timur – 141° Bujur Timur. Jika dibentangkan, maka wilayah Indonesia berada di sepanjang 3.977 mil antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2015). Pengaruh dari letak geografis menyebabkan wilayah Indonesia dipengaruhi oleh angin musim, sehingga mengalami dua perubahan musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Adanya dua perubahan musim tersebut membuat Indonesia termasuk negara dengan iklim tropis. Iklim tropis berkaitan dengan sumberdaya alam Indonesia, karena memberikan dampak yang sangat signifikan terutama sumber daya alam yang dimiliki Indonesia (Febriana, H., Handayani, R., & Budiati, A. 2019).

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 33 Ayat 3). Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan

kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional (Pasal 33 Ayat 4). Dengan demikian, sudah seharusnya bahwa negara menjaga sumberdaya alam baik yang ada di darat maupun yang ada di laut, untuk pembangunan dan juga untuk keberlangsungan kehidupan rakyat Indonesia. Selain itu, agar kekayaan alam di Indonesia tidak habis dan tetap terjaga kelestariannya (Undang-undang Dasar 1945)

Indonesia juga disebut negara agraris karena sebagian besar wilayah Indonesia terdiri atas lahan pertanian. Berdasarkan pada data Badan Pusat Statistik (BPS) tentang angkatan kerja di tiap sektor, Indonesia dikatakan sebagai negara agraris. Setidaknya, masih ada lebih dari 30% angkatan kerja Indonesia bekerja di sektor pertanian. Salah satu kekayaan alam Indonesia yaitu memiliki tanah yang relatif subur sehingga dapat dikelola untuk berbagai hal seperti pertanian. Penggunaan tanah yang paling luas adalah untuk sektor pertanian yang meliputi penggunaan untuk pertanian tanaman pangan, pertanian tanaman keras, untuk kehutanan maupun untuk ladang penggembalaan dan perikanan. Tetapi untuk daerah perkotaan khususnya, penggunaan tanah yang utama adalah untuk pemukiman serta untuk industri dan perdagangan. Penggunaan tanah yang meliputi pegunungan, pantai atau danau lebih banyak untuk keperluan rekreasi (Rahman, A., & Ramli, M. 2022)

Maka dari itu, pertanian merupakan salah satu sektor yang mempunyai peran strategis dan penting. Bagi Indonesia, sektor ini juga merupakan sektor paling krusial karena menyumbang lebih dari setengah produk domestik bruto. Dapat dilihat pada tabel 1 di bawah, bahwa pertanian memberikan kontributor

kedua dalam pertumbuhan ekonomi nasional setelah industri manufaktur terhadap PDB (produk domestik bruto) berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), pada triwulan IV 2020 dan terus memberi kontribusi positif untuk perekonomian Indonesia. Posisi sektor pertanian masih di atas sektor lainnya, seperti perdagangan maupun konstruksi.

Tabel 1 Laju pertumbuhan dan sumber pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) menurut lapangan usaha (persen)

Lapangan Usaha		Triw IV-2020 Terhadap Triw III-2020 (q-to-q)	Triw III-2020 Terhadap Triw III-2019 (y-on-y)	Triw IV-2020 Terhadap Triw IV-2019 (y-on-y)	Laju Pertumbuhan 2020	Sumber Pertumbuhan 2020
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, kehutanan, dan Perikanan	-20,15	2,16	2,59	1,75	0,22
B	Pertambangan dan penggalian	1,65	-4,28	-1,20	-1,95	-0,14
C	Industri pengolahan	-0,38	-4,34	-3,14	-2,93	-0,61
D	Pengadaan listrik dan gas	0,94	-2,44	-5,01	-2,34	-0,02
E	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	3,11	5,94	4,98	4,94	0,00
F	Konstruksi	3,48	-4,52	-5,67	-3,26	-0,33
G	Perdagangan besar dan eceran ; reparasi mobil dan	-0,87	-5,05	-3,64	-3,72	-0,49

	sepeda motor					
H	Transportasi dan pergudangan	5,08	-16,71	-13,42	-15,04	-0,64
I	Penyediaan akomodasi dan makan minum	5,86	-11,81	-8,88	-10,22	-0,31
J	Informasi dan komunikasi	0,88	10,72	10,91	10,58	0,57
K	Jasa keuangan dan asuransi	5,61	-0,95	2,37	3,25	0,13
L	Real Estate	0,07	1,96	1,25	2,32	0,07
M, N	Jasa perusahaan	2,6	-7,61	-7,02	-5,44	-0,10
O	Administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib	8,95	1,82	-1,55	-0,03	0,00
P	Jasa pendidikan	7,83	2,41	1,36	2,63	0,08
Q	Jasa kegiatan dan kegiatan sosial	5,78	15,29	16,54	11,60	0,13
R	Jasa lainnya	2,29	-5,55	-4,84	-4,10	-0,08
	Nilai Tambah Bruto Atas Harga Dasar	-1,21	-2,57	-1,83	-1,58	-1,52
	Pajak Dikurang Subsidi Atas Produk	21,37	-23,30	-9,69	-13,42	-0,55
	Produk Domestik Bruto (PDB)	-0,42	-3,49	-2,19	-2,07	-2,07

Sumber: Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV-2020

Keterangan

q-to-q: PDB atas dasar harga konstan pada suatu triwulan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya

y-on-y: PDB atas dasar harga konstan pada suatu triwulan dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya

c-to-c: PDB atas dasar harga konstan kumulatif sampai dengan suatu triwulan dibandingkan periode kumulatif yang sama pada tahun sebelumnya

Selain itu, sektor pertanian Indonesia juga sebagai penopang ekonomi bangsa, mengingat Indonesia yang luas dan kaya akan hasil dari pertanian. Secara teoritis, berkurangnya pangsa tenaga kerja dari suatu sektor dapat disebabkan oleh dua perubahan, yakni penurunan secara absolut: jumlah orang yang bekerja di sektor tersebut berkurang, atau penurunan secara relatif : laju pertumbuhan tenaga kerja di sektor tersebut lebih kecil dibandingkan di sektor-sektor lain atau tidak ada perubahan, sementara di sektor-sektor lain jumlah tenaga kerja meningkat. Kasus Indonesia menunjukkan bahwa turunnya pangsa tenaga kerja di sektor itu sejak pertengahan hingga menjelang akhir tahun 1990-an. Walaupun tidak ada data agrerat yang dapat mendukung, namun dapat diduga kuat bahwa selama periode tersebut telah terjadi transfer tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor-sektor lain, khususnya industri pengelolaan, angkutan, restoran, jasa dan lain-lain (Perkembangan sektor pertanian di Indonesia, 2003).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan

terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Hasil pertanian berupa pangan menjadi kebutuhan dasar bagi manusia yang paling utama. Dalam UUD 1945 melakukan pemenuhan akan pangan termasuk bagian dari hak asasi manusia. Karena pangan adalah kebutuhan dasar manusia, maka pangan memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan bangsa.

Setiap tahun jumlah penduduk meningkat, tetapi jumlah produksi pertanian tetap sama atau mengalami kenaikan tapi sedikit. Maka, hasil produksi pertanian tersebut belum mampu untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pangan penduduk. Pertumbuhan akan penduduk jauh lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan pangan, seperti yang dikatakan oleh Thomas Robert Malthus pada tahun 1798 dalam bukunya "Essay on the Principle of Population" bahwa pertumbuhan penduduk mengikuti deret ukur, (geometric progression, dari 2 ke 4, 8, 16, 32 dan seterusnya), sedangkan pertumbuhan produksi pangan hanya mengikuti deret hitung (arithmetic progression, dari 2 ke 4, 6, 8 dan seterusnya). Malthus menyatakan bahwa semakin tinggi jumlah populasi pada suatu waktu, semakin banyak bayi yang dilahirkan dan mengakibatkan jumlah populasi pada generasi selanjutnya makin tinggi. Pertumbuhan populasi dunia akan semakin cepat mengikuti pertumbuhan eksponensial, sementara daya dukung lingkungan seperti ketersediaan lahan dan air bertambah mengikuti deret aritmatika. Pada suatu waktu, jumlah populasi akan melebihi ketersediaan sumberdaya yang dibutuhkan (Subair, S. 2018).

Banyak orang yang memperkirakan bahwa dengan laju pertumbuhan penduduk di dunia, yang tetap tinggi setiap tahun, sementara lahan yang tersedia untuk kegiatan-kegiatan untuk pertanian semakin sempit, maka pada suatu saat dunia akan mengalami krisis pangan (kekurangan stok), seperti juga diprediksi oleh teori Malthus. Namun, keterbatasan stok pangan bisa diakibatkan dua hal, yakni karena volume produksi rendah (yang disebabkan oleh faktor cuaca atau lainnya), sementara permintaan besar karena jumlah penduduk dunia bertambah terus, atau akibat distribusi yang tidak merata ke seluruh dunia : banyak daerah seperti Afrika mengalami krisis pangan, sementara di Eropa Barat, Amerika Utara dan sebagian Asia mengalami kelebihan pangan (Perkembangan sektor pertanian di Indonesia, 2003).

Dalam menopang kemandirian pangan di tingkat nasional, Provinsi Sulawesi Selatan mendorong pengembangan diversifikasi pangan lokal sagu dalam menghadapi krisis pangan dunia. Potensi pengembangan sagu sangat besar karena hingga saat ini tercatat areal sagu nasional 5,5 juta hektar dan areal yang termanfaatkan atau areal budidaya baru sekitar 3,5 persen atau 200,85 ribu hektar, bahkan ekspor sagu nasional 2021 mencapai 13.190 ton, nilainya USD 2,47 juta. Direktur Jenderal Perkebunan Kementan Andi Nur Alam Syah mengatakan, dampak perubahan iklim ekstrim dan ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina menyebabkan pasokan pangan bersoal. Oleh karena itu, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo bertekad agar Indonesia harus mampu mewujudkan ketahanan pangan nasional melalui pangan lokal, salah satunya sagu yang dapat dijadikan sebagai bahan pangan alternatif pengganti beras dan tepung terigu sehingga tidak

bergantung pada komoditi yang selama ini impor. Selain itu, pengembangan sagu untuk kemandirian pangan lokal menghasilkan tepung sagu, dengan bantuan unit pengolahan hasil dan alat pengolahan sagu skala kelompok tani. Kedua, pengembangan tepung sagu untuk substitusi Impor, dengan rencana kegiatan selama tahun 2022-2024. Ketiga, pengembangan gula cair untuk kemandirian lokal atau skala rumah tangga. Keempat, pengembangan sagu untuk menghasilkan bio-etanol, Kementan mengalokasikan kegiatan fasilitasi alat pengolahan sagu. Diantaranya alat pamarut sagu, alat pemeras sagu dan alat penepung sagu dengan total 18 unit sarana fasilitasi pengolahan sagu di 12 kabupaten/kota dan 19 unit prasarana fasilitasi pengolahan sagu di 13 kabupaten/kota. Kementerian Pertanian dapat menumbuhkembangkan kemampuan wirausaha dari para petani untuk menghasilkan produk sagu dengan nilai tambah tinggi karena sagu merupakan pangan sehat dan sebagai pangan alternative pengganti nasi atau roti. Provinsi Sulsel adalah salah satu provinsi sentra sagu nasional dengan luas areal 3.700 hektar dan produksi mencapai 3.182 ton per tahun. Sentra produksinya di Kabupaten Luwu dan Luwu Utara merupakan sentra produksi sagu. Strategi pengembangan diversifikasi sagu ini kita dorong fasilitasi kelompok atau UMKM untuk menghasilkan tepung, usaha pengolahan berbasis sagu dan membangun industri pangan berbasis sagu. Tentunya ini butuh dukungan dari Kementan, pelaku usaha dan perguruan tinggi. Diversifikasi pangan lokal ini nantinya untuk menciptakan konsumsi beragam, bergizi seimbang dan aman (mediaindonesia.com)

Adapun kelebihan pada usaha sagu di Kabupaten Luwu Utara yaitu: Masyarakat lebih menyukai mengkombinasikan sagu dengan kapurung (makanan khas luwu), Harga yang diterapkan saat ini sudah sesuai dengan ekspektasi pelanggan, Nilai investasi kecil, Proses produksinya mudah dan Produk tidak cepat basi. Adapun kelemahan usaha sagu di Kabupaten Luwu Utara yaitu: Belum ada pengembangan produk dari sagu, Wilayah distribusi masih terbatas di sekitar wilayah Tana Luwu, meski sesekali perantau di wilayah papua memesan untuk bekal oleh-oleh, Promosi produk sagu masih sangat kurang, Pembukuan/pencatatan dan akuntansi oleh para pelaku usaha denge belum ada, Pelaku usaha adalah tenaga kerja satu-satunya, Alat pembuatan sagu masih menggunakan alat sederhana, Kemasan kurang menarik dan belum cukup baik untuk mengoptimalkan ketahanan produk agar dapat bertahan lama dan Produk mudah ditiru (Fidyansari, D., Idris, M., & wahyuningsih, W. 2018).

Pada tingkat regional, Kabupaten Lamongan tengah memasuki masa panen raya. Sebagai salah satu wilayah sentra produksi padi di Jawa Timur, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyampaikan hasil rata-rata panen di Kabupaten Lamongan cukup tinggi bahkan mencapai 7,3 ton perhektar, beliau optimis panen raya padi di Kabupaten Lamongan berjalan dengan baik dan maksimal dan yang terpenting Lamongan mampu mempertahankan predikat lumbung pangan nasional. Mentan SYL menjelaskan bahwa secara keseluruhan produksi padi dalam negeri di tahun 2022 merupakan angka tertinggi di sepanjang sejarah Indonesia merdeka. Berdasarkan data yang ada, produksi padi di tahun 2022 mencapai lebih dari 32 juta ton. Bupati Lamongan Yuhronur Efendi

mengungkapkan bahwa di tahun 2022 Kabupaten Lamongan mampu menghasilkan lebih dari satu juta ton beras. Ia berharap di tahun-tahun mendatang Kabupaten yang dipimpinnya mampu mencetak angka produksi yang lebih tinggi. Oleh karena itu perlu langkah antisipasi dini menyiapkan brigade panen seperti alat pengering dryer dan mendekatkan kostraling penggilingan ke sentra panen agar petani memperoleh harga wajar menjelang dan saat Ramadhan dan Idul Fitri, Potensi Luas Panen Kabupaten Lamongan pada Februari 2023 mencapai 31.080 Ha. Adapun total luas panen di Desa sumberaji Poktan sumber rejeki mencapai 147 Ha, dengan Varietas inpari 32, Provitanya mencapai 7,3 Ton/ha(Lamongan.go.id).

Kelebihan pada panen raya padi saat ini kalangan petani di Lamongan menyambut baik kesepakatan naiknya harga pembelian gabah dan beras jelang masa panen raya padi bulan Maret 2023 kesepakatan ini berpihak pada petani. Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Lamongan Suharjito mengatakan HKTI sebagai organisasi yang bergerak di bidang agrikultur menyambut baik kesepakatan antara Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) bersama para pelaku usaha penggilingan padi terkait besaran harga pembelian gabah dan beras menjelang masa panen raya padi bulan Maret 2023 itu. Akan tetapi di balik harga yang melambung tinggi terdapat permasalahan yang krusial bagi para petani saat ini yaitu perubahan musim atau cuaca seperti saat ini petani tidak mampu secara manual mengeringkan gabah hasil panennya sehingga petani harus menyewa alat

pengering gabah yang harganya juga tidak murah dan harus menyewa alat pengering gabah yang harganya saja Rp 400 per kilogram (www.detik.com).

Pada tingkat local yaitu pada Desa Mranggonlawang adalah penghasil budidaya bawang merah terbesar di Kabupaten Probolinggo salah satu komoditas sayuran unggulan yang sejak lama telah diusahakan oleh petani secara intensif. Hal ini karena bawang merah memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi. Meskipun minat petani terhadap bawang merah cukup kuat namun dalam proses pengusahaannya masih ditemui berbagai kendala, baik kendala yang bersifat teknis maupun ekonomis. Oleh karena itu peran pemerintah desa sebagai upaya dalam memberdayakan petani di desa Mranggonlawang ini sangat dibutuhkan (Erika, K. 2022)

Bahwasanya dalam bertani bawang merah kita dapat melihat secara langsung keuntungan dan kekurangan apa saja yang di alami oleh petani itu sendiri seperti halnya dalam sepekan terakhir harga bawang merah di tingkat petani di Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo naik signifikan hingga menembus Rp50 ribu per/Kg. Sayangnya, kenaikan harga tersebut tak bisa dirasakan seluruh petani karena di wilayah Kabupaten Probolinggo itu sendiri semakin banyak lahan pertanian yang mengalami gagal panen maka semakin mahal pula harga bawang tersebut yang dikarenakan stok bawang yang ada di pasar atau pun di gudang mengalami penurunan dan sebagian petani bawang mengalami gagal panen karena dipicu terjadinya cuaca ekstrim, banjir dan hama itu sendiri apalagi naiknya

harga bawang saat ini sudah seimbang dengan mahal nya harga obat-obatan pembasmi hama (Radarbromo.jawapos.com).

Dampak ekonomi usaha pertanian bawang merah ini sudah dilakukan secara turun temurun sehingga pengetahuan mengenai teknik bercocok tanam bawang merah juga dilakukan melalui garis keturunan. Apabila dilakukan dengan profesional, usaha budidaya bawang merah dapat meningkatkan pendapatan petani secara maksimal jika pemerintah desa ikut andil dalam proses pemberdayaan budidaya bawang merah sehingga penjualan hasil panen bawang merah dapat secara maksimal didapatkan oleh para petani khususnya bawang merah. Usaha tani bawang merah merupakan sumber pendapatan dan kesempatan kerja yang memberikan kontribusi cukup tinggi terhadap perkembangan ekonomi di desa Mranggonlawang. Hal ini tidak terlepas dari status bawang merah sebagai komoditas hortikultura bernilai tinggi (high value commodity). Usaha tani bawang merah mampu mendatangkan keuntungan yang jauh lebih besar jika dibandingkan dengan usaha tani pada komoditas pangan seperti padi atau jagung (Febriyanty, D. E. R. 2022)

Pada Strategi Pemerintah Daerah Dalam meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah (Studi pada Kabupaten Malang). Kabupaten Malang merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang berbasis pertanian. Sektor pertanian merupakan sektor dominan terutama tanaman pangan. Kabupaten Malang memiliki tanah yang subur dengan luas areal tanam pertanian padi 65.663 hektar, dengan produktivitas 6,95 ton/ha, menghasilkan panen padi tahun 2013 sebesar 456.686 ton gabah kering giling, setara 296.846 ton, setelah dikonsumsi masih surplus

beras 71.863 ton (Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksanaan Penyuluhan Kabupaten Malang, 2014).Ketahanan pangan tidak lepas dari sifat produksi komoditi pangan itu sendiri yang musiman dan fluktuasi karena sangat mudah dipengaruhi oleh iklim atau cuaca. Perilaku produksi yang sangat dipengaruhi iklim tersebut sangat mempengaruhi ketersediaan pangan di Kabupaten Malang. Kalau perilaku produksi yang rentan terhadap perubahan iklim tersebut tidak dilengkapi dengan kebijakan pangan yang tangguh maka akan sangat merugikan, baik untuk produsen maupun konsumen, khususnya produsen berskala produksi kecil dan konsumen berpendapatan rendah. Karakteristik komoditi pangan yang mudah rusak, lahan produksi petani yang terbatas, sarana dan prasarana pendukung pertanian yang kurang memadai dan lemahnya penanganan panen dan pasca panen mendorong Pemerintah untuk melakukan intervensi dengan mewujudkan kebijakan ketahanan pangan. Mengingat kebutuhan pangan merupakan salah satu hal vital yang harus dipenuhi di suatu daerah, maka diperlukan langkah strategis agar suatu daerah dapat tetap menjaga ketersediaan pangan dan akses pangan. Disamping itu, pemerintah daerah sebagai pemegang tanggung jawab juga memiliki peran yang signifikan dalam mengambil tindakan untuk memperbaiki sistem pangan. Dihubungkan dengan maraknya pembangunan yang terjadi di Kabupaten Malang, maka pemerintah kabupaten juga memiliki tanggung jawab dalam menjaga ketahanan pangan daerah (Fiandana, Y. 2015)

Pada Strategi Peningkatan Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan pangan Kota Tangerang Selatan memiliki kapasitas produksi pangan strategis yaitu beras dan kedelai kurang dari 1% serta cabe merah kurang dari 4%

setiap tahun. Lebih lanjut, kapasitas produksi untuk komoditas sayur dan buah antara lain bayam dan pepaya kurang dari 4% pada tahun 2014. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas produksi pangan di Kota Tangerang Selatan sangat rendah jika dibandingkan dengan kebutuhan pangan penduduk. Kota Tangerang Selatan dengan kapasitas produksi pangan yang rendah tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan penduduk di wilayahnya secara mandiri sehingga sebagian besar bahan pangan diperoleh melalui impor pangan atau dengan kata lain diperoleh dari luar wilayah Kota Tangerang Selatan. Rasio ketergantungan impor Kota Tangerang Selatan yang mencapai lebih dari 99% setiap tahun yaitu beras dan kedelai. Rasio ketergantungan impor cabe merah dan telur ayam ras pada tahun 2014 mencapai lebih dari 98%. Rasio ketergantungan daging sapi dan daging ayam tidak sebesar rasio ketergantungan komoditas pangan strategis lain. Kapasitas produksi pangan yang rendah diikuti dengan rasio ketergantungan impor pangan yang tinggi menunjukkan bahwa Kota Tangerang Selatan, dalam menyediakan pangan bagi penduduknya, sangat bergantung pada impor pangan atau perdagangan pangan dengan wilayah produsen pangan. Nguema dan Ella (2014) menyatakan bahwa situasi ketergantungan impor pangan akan meningkatkan kerentanan pangan penduduk dari segi ketersediaan. Perdagangan pangan yang dikombinasikan dengan kebijakan politik dan ekonomi yang baik berpeluang untuk mengatasi permasalahan ketahanan pangan tersebut. Tingkat ketersediaan energi dan protein di Kota Tangerang Selatan hingga tahun 2014 sudah mencukupi walaupun belum masuk pada kategori ideal. Tingkat ketersediaan energi dan protein sudah mencukupi, harga pangan strategis stabil

ditinjau dari koefisien keragaman harga pangan dan kualitas konsumsi pangan cenderung meningkat setiap tahunnya sehingga stabilitas pangan di Kota Tangerang Selatan stabil. Faktor eksternal yang paling penting dalam peningkatan ketahanan pangan di Kota Tangerang Selatan adalah letak geografis Kota Tangerang Selatan yang strategis sehingga memudahkan Kota Tangerang Selatan untuk dapat terhubung pada akses pangan dan informasi daerah sekitarnya, sedangkan faktor internal yang paling penting untuk peningkatan ketahanan pangan Kota Tangerang Selatan adalah komitmen kepala daerah yang kuat guna mendorong jalannya program dan kegiatan ketahanan pangan di Kota Tangerang Selatan (Rimadianti, D. M. A., Daryanto, A., & Baliwati, Y. F. 2016)

Strategi Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Boyolali Dalam Mengimplementasikan Kebijakan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal pada potensi produksi beras di Kabupaten Boyolali cukup tinggi yaitu untuk lahan dengan produktifitas < 4,5 ton padi/Ha dan luas lahan 11.776,66 Ha mencapai 45,70 %, dan untuk $\geq 4,5$ ton padi /Ha dengan luas lahan 14.006,71 produktifitasnya 54,30 %. Dengan potensi yang dimiliki Boyolali harusnya dapat mengatasi kerawanan pangan yang terjadi. Namun ternyata masih ada beberapa daerah di Boyolali yang masih rawan pangan. Berdasarkan peta komposit kerawanan pangan Boyolali tahun 2008 masih ada beberapa kecamatan di Kabupaten Boyolali yang masih masuk daerah kerawanan pangan cukup tinggi. Daerah itu antara lain Kecamatan Juwangi, Wonosegoro, Selo, Karanggede dan Klego. Meskipun keadaan ini lebih baik dari tahun 2007 namun masalah ketahanan pangan tetap harus terus diupayakan agar seluruh wilayah Kabupaten

Boyolali bebas dari kerawanan akan pangan. Dengan segala potensi dan sumberdaya yang ada, pengembangan pangan lokal Kabupaten Boyolali belum optimal, pola konsumsi masyarakat terhadap pangan lokal masih rendah, teknologi pengolahan pangan belum berkembang serta kurangnya pembinaan terhadap keamanan pangan pada industri /usaha makanan dan minuman. Di dalam strategi tersebut terdapat berbagai kegiatan antara lain : Memfasilitasi kepada Kelompok Tani/Kelompok Wanita Tani/gapoktan dan UMKM untuk pengembangan bisnis pangan segar, industri bahan baku, industri pangan olahan dan pangan siap saji yang aman berbasis sumber daya local dengan pemberian bantuan baik dana maupun alat mesin.

Seiring dengan pembangunan pertanian yang tengah dilakukan oleh pemerintah, seharusnya pemerintah desa menyediakan sarana dan prasarana untuk memperdayakan masyarakat agar lebih ditingkatkan terutama dalam segi infrastruktur pertanian, teknologi-teknologi akan senantiasa mengalami perubahan kearah yang lebih baik seperti halnya mesin traktor pertanian, alat semprot pertanian dan lain sebagainya . Suatu pembangunan merupakan proses interaksi dari banyak pihak yang secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan upaya peningkatan produktivitas dan peningkatan pendapatan serta perbaikan mutu hidup melalui penerapan teknologi yang terpilih (Amin, R., Rusandi, K., & Aziz, B. W. 2022)

Berbagai inovasi atau gagasan untuk meningkatkan kualitas maupun kuantitas produksi dalam kegiatan usaha tani nya sehingga mampu meningkatkan pendapatan petani, dalam pertanian diperlukan banyak tenaga dan juga dalam

masalah permodalan sesuai yang peneliti lihat dilapangan para petani harus menyiapkan perlengkapan seperti insektisida, pupuk agar tanaman tumbuh dengan baik sampai hari panen dan di sinilah pemerintah desa harus berperan sebagai fasilitator, dimana pemerintah desa harus berusaha untuk menciptakan atau memfasilitasi pendanaan/permodalan (Nurmaida, S. I., Edwina, S., & Yulida, R. 2023)

Salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan petani untuk peningkatan produksi bawang merah adalah ketersediaan benih/bibit bermutu. Produsen benih bawang merah di sentra-sentra produksi biasanya adalah petani yang memiliki skala usaha relatif luas atau petani individual yang menyisihkan sebagian hasil panen untuk digunakan sebagai benih musim tanam berikutnya. Beragamnya pengetahuan serta teknologi perbenihan yang berkembang dalam sistem tersebut menyebabkan terjadinya variasi mutu benih yang tinggi. Secara umum, variasi mutu benih/bibit dapat mengarah pada pencapaian produktivitas yang cenderung dibawah potensi hasil. oleh karena itu, pemerintah desa perlu menyediakan lumbung bibit agar masyarakat bias secara merata dan merasahan menanam bawang merah (Adisonda, R. 2022)

Observasi lapangan juga mengindikasikan bahwa sistem ini secara tidak langsung memungkinkan terjadinya fluktuasi harga benih yang sangat tajam. Sistem produksi benih non-formal dikenal sebagai jaringan arus benih antar lapangan dan musim. Sistem ini menghasilkan benih tidak bersertifikat. Benih yang diproduksi melalui sistem non-formal ditujukan untuk memenuhi kebutuhan petani dengan orientasi pasar tradisional yang belum menuntut persyaratan mutu.

Menyadari kenyataan tersebut, alternatif pemecahan masalah benih yang dapat ditempuh adalah memperbaiki kinerja sistem perbenihan informal atau di tingkat petani melalui pemberdayaan dan penyuluhan mengenai proses pengolahan benih yang berkualitas dan pemerintah desa harus selalu menjadi ujung tombak untuk menghadirkan dinas pertanian terkait agar petani bawang merah selalu diberikan edukasi dan pengarahan terhadap proses peningkatan hasil pertanian (Suciati, A., Sumadi., & Djamali, A. 2022)

Peningkatan produksi yang lambat sementara konsumsi terus meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan pendapatan menjadikan ketersediaan bawang merah untuk keperluan rumah tangga dan industri makanan seringkali kurang dari kebutuhan dan hal ini mendorong naiknya harga komoditas tersebut. Sebagai tanaman musiman, puncak produksi bawang merah terjadi pada bulan-bulan tertentu, sementara konsumsi bawang merah hampir digunakan setiap hari dan bahkan pada hari-hari besar keagamaan permintaannya cenderung melonjak. Adanya perbedaan pola produksi dan permintaan menyebabkan terjadinya gejolak harga pada waktu tertentu, berupa lonjakan kenaikan harga pada saat permintaan lebih tinggi dari pasokan, atau harga merosot pada saat pasokan lebih tinggi dari permintaan (PPP Medan – repository.pertanian.go.id)

Dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan pada pokok permasalahan **“Evaluasi Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 (Studi Pada Tanaman Bawang Merah di Desa Mranggonlawang Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Evaluasi Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 (Studi Pada Tanaman Bawang Merah di Desa Mranggonlawang Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo) ?

C. Tujuan Penelitian

Dengan memperhatikan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang Evaluasi Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 (Studi Pada Tanaman Bawang Merah di Desa Mranggonlawang Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo).

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang penulis harapkan berdasarkan judul “Evaluasi Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 (Studi Pada Tanaman Bawang Merah di Desa Mranggonlawang Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo)” ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

- a. Sebagai bahan kajian dan sumbangsih pemikiran dalam rangka pengembangan Ilmu Administrasi Publik dan ilmu sosial pada

umumnya, terutama mengenai teori strategi dan hal yang berkaitan dengan ketahanan pangan dan pertanian.

- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kebijakan publik.
- c. Sebagai kontribusi referensi dan sumbangan informative, komparatif bagi peneliti lain yang berkaitan dengan ketahanan pangan dan pertanian.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Universitas Panca Marga Probolinggo

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan tambahan terhadap koleksi dan sumbangan pemikiran dalam pengembangan kajian tentang kebijakan publik sehingga mampu memberikan informasi dan pengetahuan yang lebih luas.

- b. Bagi Pemerintah Kabupaten Probolinggo

Hasil ini dapat menjadi gambaran nyata dan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk meningkatkan atau kinerja dinas pertanian yang mendatang agar lebih efektif dan efisien.

- c. Bagi Masyarakat Umum

Hasil dari penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman terhadap masyarakat agar lebih peka terhadap kegiatan pemerintah, sehingga masyarakat bisa berperan aktif dalam

kegiatan dinas pertanian yang diluncurkan oleh pemerintah dalam upaya meningkatkan hasil pertanian.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan, maka serangkain penjelasan yang ada dalam laporan skripsi ini dibagi menjadi beberapa bagian dengan tatanan sistematika berikut:

BAB I : Pendahuluan

Pendahuluan membahas latar belakang sebagai uraian tentang permasalahan yang diangkat hingga memunculkan perlu dilakukannya penelitian. Rumusan masalah tercantum agar pembahasan tidak keluar dari konteks penelitian. Selanjutnya menjelaskan tujuan dan manfaat dari penelitian ini, terakhir sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka terdiri atas penelitian terdahulu sebagai acuan atau referens selanjutnya kerangka dasar teoritik yang berkenaan dengan penelitian ini, terakhir kerangka pemikiran sebagai alur atau jalannya suatu penelitian.

BAB III : Metode Penelitian

Metode Penelitian yang terdiri dari jenis penelitian yang digunakan, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitan, sumber data dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam kegiatan penelitian selanjutnya

instrumen penelitian terakhir analisis data sebagai tahapan untuk menganalisis data yang ditemukan di lapangan.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bagian sub bab ini berisikan secara rinci tentang gambaran umum yang dijadikan sebagai lokasi, selanjutnya penyajian data fokus penelitian yang berguna sebagai analisis dari temuan penelitian baik melalui data yang diperoleh maupun dari hasil observasi dan wawancara mengenai hubungan kualitatif deskriptif terkait Evaluasi Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 (Studi Pada Tanaman Bawang Merah di Desa Mranggonlawang Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo).

BAB V : Penutup

Penutup merupakan akhir dari penulisan dengan menyajikan kesimpulan akhir dari temuan penelitian serta menyampaikan saran secara tidak langsung kepada pihak yang berkaitan dan berkepentingan dengan penelitian.